

Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik

Kasypul Anwar

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

e-mail: kasypul.anw@gmail.com

ABSTRAK

Setiap pembangunan suatu negara mau tidak mau melewati serangkaian kebijakan yang harus dilaksanakan, termasuk di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dari kajian ilmiah tentang kesesuaian perumusan kebijakan pendidikan dengan implementasi yang sebenarnya. Serangkaian pencarian literatur terkait di berbagai jurnal, publikasi, buku, dan situs web secara aktif membahas masalah kebijakan dan praktik pendidikan untuk mendukung penelitian ini. Data ini dapat kita gunakan sebagai data studi setelah melalui serangkaian kajian terkait sistem pengkodean data penilaian kritis dan menyimpulkan setelah dilakukan interpretasi data secara mendalam dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data tersebut benar-benar valid dan terbaru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu tindakan yang erat kaitannya dengan cara penyelenggaraan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, pertanggungjawaban sesuai dengan tugasnya. diprogramkan oleh konstitusi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi upaya pengembangan penelitian serupa pada kegiatan penelitian yang akan datang.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Every development of a country inevitably goes through a series of policies that must be implemented, including in the field of education. This study aims to collect evidence from scientific studies on the suitability of educational policy formulation with actual implementation. A series of related literature searches across various journals, publications, books and websites actively addresses educational policy and practice issues to support this research. We can use this data as study data after going through a series of studies related to the critical assessment data coding system and conclude after an in-depth interpretation of the data using a phenomenological approach. The data is completely valid and up-to-date. Based on the results of the research and discussion of this research, it can be concluded that the implementation of education policy is an action that is closely related to the way education is carried out with full responsibility, accountability in accordance with its duties. programmed by the constitution to improve the quality and accountability of education. The results of this study are expected to be an important input for efforts to develop similar research in future research activities.

Keywords: Education Management, Education Policy, Public Service.

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai penilaian terhadap sistem nilai dan kebutuhan situasi pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu lembaga terencana yang bersifat umum dan akan menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan agar tujuan pendidikan di suatu negara dapat dengan mudah dicapai. Tercapai. (Dhawan, 2020). Kebijakan memiliki banyak pandangan dalam menghasilkan suatu keputusan atau program yang berangkat dari nilai-nilai yang diyakini oleh pemerintah sebagai pihak yang memutuskan

sehingga seringkali kebijakan menghasilkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam mencapai tujuan semula. Dengan kata lain, kebijakan harus memberikan konsep atau gagasan yang didengar tertulis yang diucapkan tetapi sering tidak dipahami dan dipahami, terutama jika diterapkan dengan sukses dan memadai. Ini karena suatu kebijakan bukanlah penilaian yang sangat masuk akal atau keputusan berdasarkan kebutuhan actual (Trip, 2011). Ini saja merupakan kebijakan bukan karena hasil pemikiran atau kajian temuan penelitian, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, biasanya organisasi

berdasarkan akal sehat yang terkadang mendominasi setiap pengambilan keputusan seperti pendidikan. Suatu kebijakan seringkali menekankan cara-cara yang tidak rasional. Artinya suatu kebijakan tidak bisa dilaksanakan karena prinsip dasarnya tidak rasional, jadi ini hanya mimpi belaka (Reimers & Chung, 2019).

Menurut Titaley dkk (2010) untuk kondisi Indonesia saat ini, pendekatan dan pelaksanaan instruksional di lapangan belum dipertimbangkan secara menyeluruh dan mendalam. Inilah situasinya. Dengan cara ini, bukti review harus diperiksa ulang dengan catatan menemukan apa yang menyebabkan pengaturan yang disepakati belum dapat diterapkan di lapangan untuk situasi ini di tingkat sekolah. Menurut McConnell (2010), menunjukkan bahwa kekecewaan strategi terjadi karena dua hal. Pertama-tama, itu tidak dieksekusi, dan eksekusi tidak membuahkan hasil. Jadi pertimbangan ekstensif dalam proses strategi publik seringkali hanya pada tingkat "definisi" strategi dengan menerima bahwa suatu pendekatan akan berjalan tanpa bantuan orang lain. Seperti ini, sorotan utama harus pada tingkat dasar, katakanlah sekolah ini adalah cara terbaik untuk melihat apakah ada polisi yang diatur memiliki pilihan untuk diselidiki di tingkat sekolah sehingga pencemaran yang sebelumnya umumnya baik, tujuannya adalah untuk membangun SDM Indonesia mengikuti tujuan instruksi publik akan ingin melihat tingkat peningkatan dan pencapaiannya. Pendekatan itu sekarang memiliki opsi untuk mempengaruhi tujuannya (Banerjee et al., 2017).

Melihat perkembangan pendidikan di Indonesia yang semakin meningkat, diawali dengan penerapan kebijakan yang didukung oleh faktor lain. Faktor lainnya adalah landasan pendidikan Indonesia yang digunakan dan kekuatan kolektif dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan yang menggunakan landasan pendidikan Indonesia sebagai pijakan yang kuat agar penyelenggaraan pendidikan nasional dapat terselenggara (Maryudi, 2016). Oleh karena itu, banyak yayasan yang mendorong perkembangan pendidikan, salah satunya adalah kebijakan yang mengikuti kearifan bangsa Indonesia. Kebijakan di bidang pendidikan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di SD, SMP, dan SMA, memang berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah telah mendapat amanat dari konstitusi dalam undang-undang. Hal ini bertekad dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(Kusumasari & Alam, 2012).

Oleh karena itu, jelas bahwa kebijakan pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam mengakses dan melindungi pengawasan kegiatan pendidikan nasional agar berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Kusumasari & Alam, 2012). Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik dengan berangkat dari karakteristik kebijakan publik, yang meliputi kebijakan yang dibuat melalui mekanisme hukum dan kemudian dilimpahkan kepada eksekutif dengan pengawasan legislatif dan yudikatif. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat yang mengatur perilaku normal mengikuti norma dan aturan yang ada sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh lembaga negara yang disetujui oleh legislatif mengikuti visi dan misi yang direncanakan untuk membuat kebijakan publik mudah diimplementasikan. dilaksanakan di lapangan.

Pernyataan sebelumnya bahwa strategi peningkatan nilai-nilai kebijakan pendidikan mulai dari bagaimana pelaksanaannya dan faktor kebutuhan apa yang sangat mendesak untuk dicapai dan diikuti oleh peraturan dan undang-undang sehingga ke arah mana memutuskan agar tujuan pendidikan yang ideal dapat tercapai (Rhodes, 2022). Mereka juga mengatakan bahwa penekanan yang berimplikasi pada strategi dapat mengacu pada tujuan pendidikan dengan perencanaan yang baik dengan program yang andal dan penerapan berbagai sistem kerja sehingga hasilnya berdampak pada pedoman yaitu tujuan kebijakan nasional melalui sistem demokrasi yang terarah dan terukur dengan segala perhitungan konsekuensi dimana inti ajaran yang diuraikan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan pemberdayaan peserta didik Indonesia menuju pencapaian pendidikan yang moderat dengan strategi pendidikan yang terukur dan evaluasi secara berkala. Hanya dapat dikatakan bahwa seorang polisi dikategorikan berhasil dan sesuai dengan harapan amanat konstitusi. Indonesia (Thies & Sari, 2018).

Setelah penilaian di atas menurut Morris & Venkatesh (2010) mewakili secara mendalam tahapan dan atribut pembuatan strategi; eksekusi adalah bagian. Tahap utama adalah persiapan rencana; kepribadian tahap ini, misalnya, otoritas yang dipilih dan disebutkan, menempatkan masalah dalam rencana publik. Tahap selanjutnya adalah definisi strategi; Ciri dari tahap ini adalah, misalnya, penguasa menentukan pilihan pengaturan untuk mengatasi masalah. Pilihan strategi melihat kebutuhan untuk membuat perintah pemimpin, pilihan hukum, dan kegiatan administratif. Tahap ketiga adalah penerimaan strategi, kepribadian

pada tahap ini, misalnya, pilihan strategi yang diadopsi dengan bantuan sebagian besar dewan, kesepakatan di antara para pemimpin organisasi, atau hukum pilihan. Tahap keempat adalah eksekusi strategi kepribadian tahap ini, misalnya pengaturan yang telah diambil dilakukan oleh unit pengatur yang mengaktifkan moneter dan sumber daya manusia.

Selain itu, tahap terakhir adalah penilaian strategis; kepribadian tahap ini, misalnya, unit review dan pembukuan di pemerintahan, memutuskan apakah kepala, administrasi, dan badan hukum memenuhi persyaratan hukum dalam membuat pendekatan dan pencapaian tujuan. Sebagai aturan umum, penulis menyimpulkan bahwa eksekusi strategi adalah tahap ketiga setelah tahap perencanaan pendekatan masalah dan tahap penetapan definisi dan penerimaan (Bryson, 2018). Sukses selanjutnya setelah tahap eksekusi adalah tahap pengecekan dan penilaian. Kepastian substansi dan pengelompokan fase-fase pendekatan interaksi itu sendiri tidaklah statis. Kontras semua bersamasama, dan konten dapat dibawa oleh sudut pandang alternatif dan hipotesis yang digunakan dalam pembuatan strategi. Kepastian ini kemudian tumbuh semakin kuat sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialami, meliputi berbagai strategi pemisahan, jenis pengaturan, dan pendekatan iklim (Ananta dkk., 2015). Menghubungkan keragaman dan kontras dalam konteks atau hipotesis pembuatan strategi, misalnya, cenderung diikuti dalam karya Katz (2015), yang mengusulkan bahwa tiga spekulasi mendasar dapat digunakan selama waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan, yaitu: (1) Hipotesis Rasional Luas - adalah hipotesis yang mengkoordinasikan bahwa penciptaan pendekatan umum diselesaikan dengan bijak dan menyeluruh dengan berkonsentrasi pada masalah dan opsi strategi cukup. (2) Hipotesis inkremental adalah hipotesis yang tidak berkorelasi dengan isu dan pilihan.

Menurut Ananta dkk (2015) Pemisahan berbagai strategi, misalnya dengan pendekatan skala penuh dan miniature pengaturan yang terintegrasi dan terdesentralisasi (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); strategi tingkat fokus dan pengaturan tingkat teritorial; seperti halnya pendekatan pada level publik, level umum (*general setting level*), level unik (*extraordinary strategy level*) dan level spesifik, diusulkan untuk menggabungkan pengaturan yang bermakna, pendekatan prosedural, strategi distributif, pengaturan redistributif, strategi organisasi, pendekatan administrasi mandiri, pendekatan material, strategi perwakilan, pengaturan besar agregat, strategi besar pribadi, pengaturan liberal, dan pengaturan moderat. Menurut Anderson dkk.

(2012) juga mengusulkan enam standar yang harus dipertimbangkan dalam memilih pengaturan, khususnya: kualitas yang dimiliki oleh asosiasi, pemanggilan, orang, pendekatan dan sistem kepercayaan, koneksi kelompok ideologis, kepentingan konstituen, peringkat populer, memperhatikan pertemuan yang berbeda; dan aturan strategi. Memang, sebagai aturan umum, peneliti politik mengatur strategi semacam ini ke dalam kelas yang bermakna (misalnya, pelatihan, pekerjaan, bantuan sosial pemerintah, kebebasan sosial), klasifikasi kelembagaan (misalnya, peraturan, hukum, departemen), dan klasifikasi strategi seperti yang ditunjukkan oleh kerangka kerja. Waktu (misalnya, pendekatan Reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama). Keragaman iklim strategis, seperti keragaman perspektif sosial, politik, moneter, dan sosial; segmen iklim dan iklim geografis; dan varietas lain yang memiliki faktor yang berhubungan dengan pengaturan pengaturan keanekaragaman iklim (Tukker et al., 2010).

METODE PENELITIAN

Bagian metode ini akan memaparkan pelaksanaan penelitian ini, dimulai dari rumusan masalah pencarian data, analisis, dan pelaporan hasil (Sugiyono, 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti ilmiah yang telah dipublikasikan yang relevan dalam mengambil temuan-temuan di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu antara kebijakan pendidikan dan implementasinya di Indonesia. Juga sebagai tinjauan pustaka tentang pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Peneliti pertama kali mencari serangkaian publikasi internasional database melalui pencarian elektronik menggunakan mesin pencari (Pathak dkk., 2013). Peneliti mengumpulkan data dengan studi dokumentasi dengan data dukung pencarian google dengan pendekatan fenomenologis penilaian data, peneliti selalu mendapatkan jawaban untuk mencapai nilai validitas yang didukung data. Penelitian ini dengan analisis data kualitatif deskriptif dimana peristiwa diprioritaskan pada data sekunder. Peneliti telah meninjau pendekatan ini melalui sistem operasi, sistem pengkodean data, sistem integrasi data, dan akhirnya, menarik sebagian besar kesimpulan. Peneliti mengkaji relevansi kebijakan pendidikan dan penerapannya di Indonesia dengan hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2017). Basis data yang peneliti kunjungi terbatas pada aplikasi atau web database pencarian dari tahun 2010 hingga 2021, dengan berbagai tema dari kategori pendidikan kebijakan dan penerapannya di dalam negeri.

HASIL PENELITIAN

Memahami kebijakan pendidikan

Pengertian istilah implementasi kebijakan pendidikan adalah upaya memahami bagaimana kebijakan pendidikan secara komprehensif dapat dipahami, terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pendidikan di Indonesia sebagai pelayanan public (Armstrong dkk., 2011). Ke depan, ketika telah diperoleh pemahaman mengenai implementasi kebijakan yang diberikan dalam kerangka hukum Indonesia, maka berpotensi kebijakan ini akan berlangsung lebih rumit dan kompleks daripada proses perumusan kebijakan itu sendiri. Mengapa demikian karena dari pengalaman, terlihat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia selalu mengumumkan perubahan baik dalam maupun dalam penerapannya setiap tahun. Namun, di penghujung tahun, istilah masa kepemimpinan yaitu lima tahun, cerita lama terulang kembali, artinya tidak seperti yang direncanakan, didokumentasikan, dan diamanatkan oleh konstitusi dilaksanakan oleh eksekutif di Indonesia. Hal ini tidak lain adalah dapat dikemukakan ketika undang-undang pendidikan yang telah dikonsepsikan sedemikian rupa namun mengalami permasalahan pada bagian ini berbeda karena sulitnya memindahkan sesuatu yang sudah terbiasa dengan cara lama.

Kebijakan sekolah di Indonesia

Sistem pendidikan dibagi menjadi beberapa model di Indonesia; ada sistem sekolah dan sekolah agama. Namun, keduanya berbagi sistem dan kurikulum, dan kurikulum inti mengikuti mandat sekolah seperti madrasah (Ilyasin, 2020). Sistem sekolah mengakui salah satu tujuan negara, dan tujuan kedua agama adalah untuk mengajarkan kehidupan bernegara. Sekolah adalah kebebasan tanpa batas bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk itu, setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk memperoleh pengajaran yang berkualitas sesuai dengan kecenderungan dan bakat masing-masing siswa dengan sedikit memperhatikan posisi konten sosial, status keuangan, kebangsaan, agama, ras, dan orientasi seksual. Sistem pendidikan setiap unit sekolah memastikan bahwa mereka mengikuti sistem dan kebijakan nasional untuk siswa yang memiliki tujuan pembelajaran mengikuti pilihan mereka. Hambatan finansial dan sosial atau batas geologis, dengan menawarkan bantuan pendidikan untuk mencapai hak individu siswa yang kurang beruntung secara finansial. Sekolah umum bagi daerah maju dan berkembang seperti di tingkat provinsi di Indonesia merupakan program besar yang menghadirkan kesulitannya dan harus terus dibina dengan sistem otonomi sekolah (Eljawati dkk., 2021; Zulkhairil dkk., al., 2021; Glewwe,

1996).

Sekolah yang tidak berpihak pada hak, keadilan, dan kebijakan publik harus dilihat dalam pengembangan kepentingan daerah, khususnya individu siswa yang berkompeten dan peduli terhadap masalah pemerataan pendidikan (Defourny & Nyssens, 2010). Konsekuensinya adalah memberikan posisi dan peran yang lebih kritis kepada komponen lokal dan regional daripada perkotaan untuk mempromosikan pengajaran yang setara dan berbagi. Hal ini sangat penting dan disamping potensi dan kebutuhan masyarakat yang semakin demokratis. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dan kelembagaan harus memenuhi dan mengembangkan produktivitas dan kesinambungan pendidikan sesuai amanat konstitusi dan melibatkan sumber daya manusia yang terukur dan terdidik, yang menggarisbawahi keterampilan yang merata pada seluruh anak bangsa. Beberapa hal yang secara mendasar mendukung dalam menunjang pendidikan, yaitu; 1) Manajemen berbasis sekolah. Hal ini meliputi a) Peran kepala sekolah dan jaringan kerjasama sekolah diperlukan untuk mewujudkan sekolah yang kompetitif dan partisipatif dari pengurus/pengelola komite sekolah. 2). Administrasi yang andal dan staf pengajar mereka didesak untuk meningkatkan diri, menjadi inovatif, dan beralih ke transformasi. 3) Kepemimpinan sekolah dan lingkungan setempat menjadikan sekolah sebagai tempat yang paling nyaman bagi siswa tingkat lanjut untuk belajar. 2) Pembelajaran aktif, kreatif. Praktik mengajar yang baik dan menyenangkan, termasuk a) Kepala sekolah dan guru harus memahami ide dan pendekatan pembelajaran untuk anak-anak dan memandang kaum muda sebagai orang yang menarik dengan berbagai kapasitas. b) Sistem pembelajaran direncanakan menggunakan asosiasi ruang belajar dengan tujuan agar guru dan siswa menjadi dinamis dan inovatif yang menjunjung tinggi terbentuknya pembelajaran yang memberdayakan dan menyenangkan.

Partisipasi seniman pendidikan daerah, antara lain a) Menggali semangat kelompok masyarakat, mendukung komite sekolah, dan komitmen pelatihan kelancaran sekolah. b) Kelompok masyarakat terlibat dan merasa memiliki sekolah. c) Sekolah terbaik yang diminati masyarakat adalah sekolah yang kepala sekolahnya memahami dan menerapkan tata kelola berbasis sekolah; pendidik mereka dan daerah mereka bekerja sama secara efektif untuk membina sekolah (Suroso dkk., 2021). Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penataan, dengan tujuan agar pelaksanaan berbagai bagian sekolah tidak menutup-nutupi, saling melempar tugas dan kewajiban. Dengan begitu, tujuan yang telah ditetapkan sebagai wujud nyata

dari visi dan misi asosiasi dapat tercapai dengan sukses, produktif, dan sesuai dengan kebutuhannya. Strategi pelatihan digunakan sebagai pendamping kemandirian hukum pendidikan dan disesuaikan dengan iklim belajar yang moderat. Kapasitas Penyusunan Instruktif adalah pendekatan instruktif yang dilakukan untuk membantu dalam bertindak, mengkoordinasikan latihan dalam pelatihan atau asosiasi atau sekolah dengan daerah dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selain dari hal-hal lain. Menurut Suroso dkk (2021) “Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang tulus untuk melanjutkan kehidupan publik yang bebas, publik Indonesia pada saat ini menyatakan otonominya. Kemudian, dari sana, untuk membentuk badan legislatif negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjaga seluruh pertumpahan darah Indonesia dan seluruh. Pertumpahan darah Indonesia dan memajukan bantuan umum pemerintah, mencerdaskan kehidupan bernegara dan berkepentingan memenuhi tuntutan dunia dengan memperhatikan kesempatan, kerukunan abadi, dan hak-hak sipil (Latif, 2012).

Kebijakan sekolah

Dukungan dan pengawasan yang optimal terhadap pendidikan berbasis sekolah sangat penting bagi negara Indonesia; Bahkan dalam pengusiran UUD 1945, target persiapan publik adalah untuk menerangi keberadaan Negara. Artinya, kapanpun bimbingan belajar harus menjadi perhatian orang Indonesia, untuk keadaan pemerintah Indonesia saat ini, pertimbangkan untuk memilih dan teknik untuk tingkat bimbingan (Sari, 2020). Tindakan publik merupakan siklus yang membantu setiap struktur menangani isu-isu publik. Eksekusi prosedur adalah kumpulan metodologi di tingkat akar rumput. Ini memberikan bentuk praktis untuk refleksi, serangkaian kegiatan, dan pengembangan untuk melibatkan orang-orang untuk mengawasi perubahan baru. Bank Dunia menginformasikan dan menilai bahwa gagasan untuk mempersiapkan diri di Indonesia masih rendah, meskipun peningkatan induksi bimbingan lingkungan dianggap telah meluas. Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Latif (2012) mengatakan bahwa persiapan yang pas-pasan itu tercermin dari situasi paling kritis Indonesia saat ini dari negara-negara perbatasan.

Kebijakan instruksi di Indonesia

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa kemajuan sekolah di setiap jenjang mengalami penurunan. Ada pengurangan sekolah dasar negeri di tingkat sekolah yang lebih muda karena rencana penataan (Nkurunziza dkk., 2012). Namun pengurangan ini juga diimbangi dengan penambahan sekolah PAUD swasta. Selain itu,

terlihat bahwa semakin tinggi tanggung jawab sektor swasta terhadap tempat kerja informasi, semakin tinggi pula tingkat bimbingannya. Terlihat bahwa pada tingkat sekolah terpilih dan sekolah ahli, guru non pemerintah dikalahkan oleh 50,24 persen dan 74,58 persen. Selain itu, dilihat dari kondisi lobi review, sebagian besar kelas di setiap tingkat bimbingan belajar dalam kondisi rusak. Tingkat kelas dalam kondisi luar biasa di sekolah-sekolah yang tidak didanai pemerintah lebih tinggi daripada sekolah-sekolah negeri di setiap tingkat pengantar. Derajat perpustakaan sekolah umum bersubsidi lebih tinggi daripada sekolah berbasis biaya di setiap tingkat pembangunan. Gelar guru bergelar sarjana dan non-sarjana atau lebih tidak terlalu memenuhi syarat pada TA 2020/2021, namun dilihat dari jumlah yang bertambah, terlihat berbeda pada tahun 2019 (Riyanto, 2019).

Di sisi lain, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa peningkatan sekolah di setiap jenjang mengalami penurunan akademik tahun 2021 (Sibarani & Sinamo, 2022). Penurunan jumlah sekolah dasar diharapkan pada tingkat anak usia dini karena metodologi pull-together. Pengecekan juga mengikuti pertumbuhan jumlah sekolah swasta yang lebih muda. Selain itu, terlihat pula bahwa semakin tinggi tanggung jawab area sekolah swasta untuk mencerahkan tempat sekolah belajar maka semakin tinggi pula tingkat selulitnya. Secara umum akan terlihat bahwa di tingkat sekolah swasta dan sekolah negeri, sekolah berbasis SPP kalah 50,24 persen dan 74,58 persen, masing-masing. Selain itu, dari kondisi wali kelas, sebagian besar kelas di setiap jenjang bimbingan belajar dalam kondisi kurang baik. Tingkat kelas luar biasa di sekolah berdasarkan biaya pendidikan lebih tinggi daripada sekolah umum bersubsidi di setiap tingkat pembangunan. Gelar perpustakaan untuk sekolah bersubsidi pemerintah lebih tinggi daripada sekolah berbasis uang sekolah di setiap tingkat persiapan. Jenjang guru bergelar sarjana atau lebih sangat datar pada TA 2020/2021, namun dari segi jumlah yang bertambah terlihat berbeda dibandingkan dengan tahun ajaran 2019.

Kebijakan dan implementasi relevansi

Dalam rangka implementasi kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah pusat di Jakarta agar dapat diimplementasikan di tingkat daerah dan provinsi, hal tersebut merupakan salah satu pendorong atau penyebab efektifitas suatu kepolisian dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Ekawati dkk., 2019). Seperti yang kita ketahui bersama, kapasitas penyelenggaraan pendidikan sangat bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, dari satu pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya. Artinya satu peraturan dikatakan seragam tetapi dimaknai dengan tingkat

pemahaman yang berbeda di setiap kabupaten kota dan masing-masing sekolah. Hal ini terjadi karena daerah yang berbeda memiliki sumber daya manusia yang berbeda dalam memahami setiap butir kebijakan dan instruksi, termasuk pimpinan sekolah atau sumber daya manusia dari penggerak seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Masing-masing sekolah akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap setiap kebijakan dan keputusan pelaksanaan pemerintah. Sehingga hal inilah yang perlu diungkap agar masyarakat luas memahami antara lain apa saja fenomena atau permasalahan yang sering terjadi sehingga kedepannya melalui upaya peningkatan kualitas literasi, termasuk pertimbangan-pertimbangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. penyelenggaraan pendidikan, yaitu masyarakat yang sudah memahami masyarakat yang sudah mampu menganalisis apalagi melaksanakan segala kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kesimpulannya adalah salah satu penyebab perbedaan hasil pendidikan di semua daerah adalah para pemimpin masing-masing daerah memahami, menganalisis dan mengimplementasikan setiap item dokumen dan kebijakan yang dipelihara melalui peraturan dan undang-undang yang ada.

Kesetaraan pendidikan

Mutu menekankan pentingnya pemenuhan bagi manusia dan seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, identitas, dan perbedaan lainnya yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Dalam Prioritas dan Strategi Pendidikan, Bank Dunia. Menurut Miller (2020), menyatakan bahwa nilai-nilai kesetaraan dalam penyelenggaraan pelatihan secara teratur merugikan orang miskin, kelompok etnis minoritas, dan keturunan pekerja jalanan. Dalam menerapkan strategi kemandirian provinsi di sekolah, yang merupakan bantuan umum, masyarakat harus memiliki pilihan untuk menawarkan dukungan yang sama kepada semua orang sebagai individu dari daerah setempat. Para ahli memiliki banyak ide untuk mengukur implementasi regulasi publik, termasuk strategi instruktif. Namun, menurut Harris dkk (2021), tiga gagasan penting untuk merencanakan dan memperkirakan kualitas administrasi: ekonomi, produktivitas, dan kecukupan. Setelah mengarahkan tinjauan terhadap desentralisasi persekolahan di Indonesia, Harris dkk (2021), menyarankan untuk memperkirakan pelaksanaan strategi kemandirian provinsi dalam pengajaran, khususnya ekonomi, keterampilan, kelangsungan hidup, keterusterangan, dan tanggung jawab.

Akuntabilitas

Upaya membangun sumber daya manusia baik

secara kuantitas maupun kualitas harus dilihat dengan memanfaatkan pedoman keuangan, produktivitas, kecukupan, keterusterangan, dan tanggung jawab (Ham et al., 2016). Oleh karena itu, setiap tindakan untuk mengembangkan SDM dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aset atau rencana pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan yang harus dilakukan dengan menggunakan atau memungkinkan akses SDM, aset, dan kantor. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah pelaksanaan eksekusi hierarkis dan untuk membantu pencapaian tujuan yang dimodifikasi, dan harus dilakukan secara tidak memihak dan lugas sesuai dengan pedoman yang relevan, dan harus bertanggung jawab secara tulus. Peningkatan instruktif adalah kemajuan yang konstan. Kita membutuhkan hukum untuk membuat perubahan di arena publik. Hukum dianggap perlu untuk mengakui peraturan pemerintah karena hukum mengembangkan aparatur untuk mengenali strategi pemerintah. Berdasarkan Ham et al. (2016) menyetel produsen agar hanya memiliki satu perangkat dapat mempengaruhi praktik mitra. Perangkat adalah prinsip yang digunakan untuk membuatnya. Undang-undang tersebut memberikan otentisitas pada implementasi strategi pemerintah. Sebagai pedoman hukum, hal ini telah menunjukkan hukum sebagai alat untuk melakukan pendekatan.

Kebijakan pendukung

Untuk mengkoordinasikan pelatihan dan mengarahkan daerah agar sesuai dengan tujuan ideal, penggunaan hukum untuk melaksanakan strategi memiliki arti penting sebagaimana ditekankan oleh Tripp (2011) bahwa gagasan tentang semua instrumen hukum yang berlaku secara keseluruhan merupakan syarat penting untuk penggunaan hukum yang kokoh dan mahir sebagai instrumen perubahan sosial yang ditunjuk. Di sini, seluruh instrumen hukum menjadi sub-regulasi masyarakat sehingga pengertian instrumen strategis yang sah diakui dalam refleksi instrumen pendekatan sosial lainnya. Mengingat esensi hukum sebagai pendekatan regulasi, regulator dan pelaksana perlu memahaminya sebagai strategi. Ahli strategi harus memahami berbagai pendekatan tingkat yang lebih tinggi sehingga pengaturan implementasi akhir tidak bergumul dengan pendekatan tingkat yang lebih tinggi. Penataan yang akan difinalisasi sepenuhnya disiapkan untuk memandu pelaksanaan pendekatan sekolah. Sebagai pelaksana strategi kemerdekaan wilayah di bidang pembangunan, pemahaman terhadap determinan hukum dan pedoman sebagai tatanan yang runtut harus dimiliki. Jika pelaksana pendekatan tidak memahami strategi, tujuan penyusunan tidak akan tercapai.

Implementasi kebijakan publik

Sistem publik, seperti yang ditunjukkan oleh Dwidjowijoto (2004), dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen, spesifik: (1) pelaksanaan dan korespondensi antar afiliasi, (2) sifat organisasi kantor, (3) kondisi moneter, sosial, dan ekologi. Masalah legislatif, dan (4) sumpah spesialis. Lebih-lebih lagi, Umanto dkk. (2016), terungkap bahwa selain keempat faktor tersebut, terdapat faktor-faktor tambahan di luar prosedur terbuka yang mempengaruhi pelaksanaan, yaitu: (a) indikasi kemajuan keuangan negara, (b) bantuan daerah, (c) sikap dan sumber daya konstituen, (d) dukungan posisi yang lebih signifikan, (e) kewajiban dan sifat dorongan untuk melakukan spesialis. Sebenarnya Pelaksanaan sistem tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan memahami tujuan pertemuan, tetapi juga asosiasi kekuatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, semua hal dipertimbangkan, termasuk dan yang pada akhirnya mempengaruhi dampak atau guncangan kepentingan publik. Penyelenggaraan pengorganisasian publik erat kaitannya dengan faktor manusia dengan berbagai institusi di bidang publik, budaya, dan lain-lain. Salah satu faktor yang menentukan apakah suatu tindakan tercapai atau tidak adalah kemampuan untuk menyelesaikan teknik yang telah diatur. Seperti yang diungkapkan oleh Dhawan (2020), prestasi dan, secara umum, frustrasi dapat disurvei sama seperti kemampuan untuk menyampaikan program sebagaimana diatur.

Setiap pengaturan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu seperti yang ditetapkan, dan pelaksanaan strategi adalah interaksi untuk melakukan atau memahami tujuan yang digambarkan di dunia nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi persekolahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi pelatihan karena dapat diatur jika tidak dilaksanakan. Kekecewaan terjadi karena interaksi eksekusi akan terhubung dengan iklim 100% setiap saat (Widana dkk., 2020). Setiap strategi sebagai hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari keadaannya saat ini, yang disebut kerjasama dengan masyarakat, komponen sosial-sosial, dll. Dari satu perspektif, strategi instruktif sebagai kerangka menerima bahan sebagai kontribusi untuk ditangani lebih lanjut. memberikan kualitas abadi sebagai hasil di sepanjang garis ini. Pada kenyataannya, setiap pedoman dan strategi instruktif akan selamanya berubah melalui perubahan konvensional dan perubahan yang dilakukan oleh organisasi saat bertindak.

Eksekusi strategi publik diarahkan untuk

membentuk hubungan yang memberdayakan tujuan strategi untuk diketahui. Dalam penelitian pelaksanaan pengaturan publik, organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi siklus pelaksanaan dan variabel lain yang juga mempengaruhinya (Widana dkk., 2020). Kajian ini membuat sebuah sistem model penting dalam menjalankan strategi pelatihan di Indonesia. Berdasarkan hipotesis Gerston, hasil kajian menemukan bahwa pertimbangan mendasar dalam pelaksanaan persekolahan terkait dengan kapasitas interpretasi, aset tenaga kerja/manusia, kemampuan eksekutif, jumlah pelaksana, dan tanggung jawab. Perubahan hipotesis tersebut dianggap layak dengan kebenaran bagaimana penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan di Indonesia. Penemuan-penemuan studi ini menggarisbawahi tugas utama kapasitas kepala tingkat menengah, terutama tentang kapasitas interpretasi. Kapasitas ini terkait dengan penguraian pedoman dan strategi di tingkat yang lebih signifikan untuk dijalankan di tingkat yang lebih rendah.

Selain itu, efek samping dari persepsi pelaksanaan pengaturan sekolah di pemerintah terdekat di Indonesia juga mengamati bahwa direktur instruksi tingkat tambahan memainkan peran penting. Hal berbeda yang harus diselesaikan oleh otoritas publik sebagai pengontrol dan pemimpin oleh dan oleh adalah untuk menjamin direktur pelatihan tingkat opsional yang memadai untuk menangani masalah instruktif yang berbeda. Hal ini karena, tragisnya, kebanyakan eksekusi akhir-akhir ini hanya menyoroti di tingkat sekolah dan tidak melihat itu di banyak peristiwa, sekolah. Mengalami masalah yang memenuhi pedoman yang diterapkan mengingat tidak adanya bantuan dari administrator instruksi tingkat opsional dan kepala pelatihan di tingkat yang lebih tinggi (Widana dkk., 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bagian terakhir ini akan merangkum peran penting yang dijelaskan di bagian temuan dan mendiskusikan hasilnya. Dari rangkaian penyajian data yang telah kami paparkan pada bagian hasil, kini dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan atau kebijakan yang diamanatkan pelaksanaannya, dalam hal ini pendidikan yang diamanatkan kepada penyelenggara dinas pendidikan dan sekolah, diharapkan dapat mencapai tujuan akhir. tujuan yang telah digariskan dan telah menjadi kebijakan publik dalam suatu proses. agar dalam pelaksanaannya dapat terwujud sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, jika masyarakat ingin mencapai tujuan yang diharapkan, maka kebijakan pendidikan memiliki

kedudukan yang sangat strategis dalam pelayanan pendidikan itu sendiri. Karena setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pernikahan, itu adalah rencana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Saran

Setiap kebijakan berupa aturan-aturan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari pertimbangan lingkungan sekolah yang dicapai dan konteks pembelajaran yaitu mencerdaskan anak bangsa dan anak bangsa yang didalamnya terdapat unsur-unsur lain seperti politik sosial budaya. dan juga ekonomi, yang kesemuanya akan berdampak pada output. Untuk dicapai. Maka implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan sangat penting untuk membentuk suatu kemungkinan hasil yang dapat diwujudkan dengan menganalisis berbagai kebijakan dan juga melihat pertimbangan birokrasi dan fasilitas yang ada sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan ada kendala berarti yang berdampak. Adapun hasil yang paling signifikan yang perlu kami hadirkan disini ya Allah, dimana kajian kami pada bagian paparan, kami telah menyebutkan pertama kegembiraan memahami kebijakan pendidikan. Di sini para pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru, bahkan orang tua dan wali harus memiliki pemikiran dan kajian yang tajam agar dapat memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan sehingga dalam pelaksanaannya karena merekalah yang paling inti dapat memahami dan dapat dipahami untuk menerapkannya untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang atau kumpulan kebijakan.

Selanjutnya peneliti melihat bahwa penyelenggaraan pendidikan ditujukan kepada sekolah, maka sekolah harus menjadi tempat yang paling mendukung dengan iklim yang paling kondusif sehingga setiap perwira polisi yang terdaftar di tingkat pusat dapat dengan mudah digambarkan di tingkat lapangan, yaitu sekolah atau madrasah. Kebijakan sekolah dapat disederhanakan dalam praktiknya, yaitu pada tataran pelaksanaan yaitu sekolah dengan pemahaman mengatur peraturan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk staf siswa dan masyarakat setempat dengan keterampilan kepemimpinan sekolah yang optimal. Demikian pula kebijakan pendidikan dan pengajaran di Indonesia diarahkan kepada kementerian pendidikan, pendidikan sosial, dan kebudayaan; dalam hal ini, mereka dapat menurunkannya ke tingkat layanan provinsi dan hingga ke tingkat sekolah, di mana hierarki antar label terjadi. Lanjut, Memang setiap lima tahun ada perubahan atau nama pembuatan kebijakan dan

harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun tersebut, namun implementasinya tidak selalu berhasil seperti yang direncanakan di kepolisian. Demikian juga kebijakan yang perlu dikaji pemahamannya yaitu dalam pelaksanaannya adalah pemerataan dan pemerataan. Sekolah harus memahami bahwa dua kemungkinan harus dipahami, yaitu pemerataan, prinsip pelaksanaan. Selanjutnya untuk kepentingan tas ini merupakan hal yang mendasar dimana dalam pemberdayaan sumber daya manusia yang ada, kualitas dan kuantitas harus menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan dipahami sehingga dapat dilaksanakan sesuai koridor dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya diberhentikan di tingkat sekolah, perlu ada kebijakan atau orang-orang yang mendukung kebijakan tersebut.

Demikian pula pelaksanaan setiap kebijakan revolusioner di bidang pendidikan harus dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen sehingga para ahli seperti Amitraz, ilustrasi kepala eksekutif, legislatif, dan semua sekolah di sini harus dipersiapkan dengan baik dan mendukung. dan memiliki otot yang mengikuti tanggung jawab dan tujuan masing-masing. Masing-masing pihak terlibat. Demikian juga penting yang dapat kami uraikan di sini, yang kesemuanya merupakan bukti dari emiten yang telah kami ulas dari berbagai sumber literatur yang ada, sehingga kami yakin temuan tersebut menjadi masukan yang diperlukan dan sangat mendukung upaya peningkatan kualitas penelitian sejenis di Indonesia. masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A., Arifin, EN, & Hasbullah, MS (2015). *Demografi suku bangsa Indonesia*. Penerbitan ISEAS.
- Anderson, JQ, Boyles, JL, & Rainie, L. (2012). *Dampak Masa Depan Internet pada Pendidikan Tinggi: Para Ahli Mengharapkan Lingkungan Kolaboratif yang Lebih Efisien dan Skema Penilaian Baru; Mereka Khawatir tentang Kursus Online Besar-besaran, Pergeseran dari Kehidupan Di Kampus*. Pew Internet & Proyek Kehidupan Amerika.
- Armstrong, D., Armstrong, AC, & Spandagou, I. (2011). *Inklusi: Karena pilihan atau kebetulan?*. *Jurnal internasional pendidikan inklusif*, 15(1), 29-39.
- Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., ... & Walton, M. (2017). *Dari bukti konsep hingga kebijakan yang terukur: Tantangan dan solusi, dengan aplikasi*. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 31(4), 73-102.

- Bryson, JM (2018). Perencanaan strategis untuk organisasi publik dan nirlaba: Panduan untuk memperkuat dan mempertahankan pencapaian organisasi. John Wiley Press.
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Konsepsi perusahaan sosial dan kewirausahaan sosial di Eropa dan Amerika Serikat: Konvergensi dan divergensi. *Jurnal kewirausahaan sosial*, 1(1), 32-53.
- Dhawan, S. (2020). Pembelajaran online: Obat mujarab di masa krisis COVID-19. *Jurnal sistem teknologi pendidikan*, 49(1), 5-22.
- Dwidjowijoto, RN (2004). Komunikasi pemerintahan: sebuah agenda bagi pemimpin pemerintahan Indonesia.
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sari, GK, & Muttaqin, MZ (2019). Kebijakan yang mempengaruhi implementasi REDD+ di Indonesia (kasus di Papua, Riau dan Kalimantan Tengah). *Kebijakan hutan dan ekonomi*, 108, 101939.
- Eljawati, E., Tefa, G., Susilawati, S., Suwanda, SN, & Suwanda, D. (2021). Kepemimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *Kajian Linguistik dan Budaya*, 6(S1), 252-263.
- Glewwe, P. (1996). Relevansi perkiraan standar tingkat pengembalian ke sekolah untuk kebijakan pendidikan: Sebuah penilaian kritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 51(2), 267-290.
- Ham, C., Berwick, D., & Dixon, J. (2016). Meningkatkan kualitas di NHS Inggris. London: Dana Raja.
- Harris, F., McCaffer, R., Baldwin, A., & Edum-Fotwe, F. (2021). Manajemen konstruksi modern. John Wiley & Sons.
- Ilyasin, M. (2020). Transformasi Manajemen Pembelajaran: Studi Integratif Kurikulum Pondok Pesantren. *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*, 13-22.
- Katz, J. (2015). Sebuah teori metodologi kualitatif: Sistem sosial kerja lapangan analitik. *Metode (e) s: Tinjauan Afrika Metodologi Ilmu Sosial*, 1 (1-2), 131-146.
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Model pemulihan bencana berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Pencegahan dan Manajemen Bencana: Sebuah Jurnal Internasional*.
- Latif, A. (2012). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (Disertasi Doktor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Maryudi, A. (2016). Memilih verifikasi legalitas kayu sebagai instrumen kebijakan pemberantasan illegal logging di Indonesia. *Kebijakan Kehutanan dan Ekonomi*, 68, 99-104.
- McConnell, A. (2010). Memahami keberhasilan kebijakan: Memikirkan kembali kebijakan publik. *Pendidikan Tinggi Internasional Macmillan*.
- Miller, A. (2020). Pembangunan melalui pendidikan vokasi. Pengalaman hidup anak muda di sebuah restoran pendidikan kejuruan, pelatihan di Siem Reap, Kamboja. *Heliyon*, 6(12), e05765.
- Morris, MG, & Venkatesh, V. (2010). Karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja: Memahami peran implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan. *Mis Quarterly*, 143-161.
- Nkurunziza, J., Broekhuis, A., & Hooimeijer, P. (2012). Pendidikan gratis di Rwanda: Hanya satu langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan saudara kandung. *Penelitian Pendidikan Internasional*, 2012.
- Pathak, V., Jena, B., & Kalra, S. (2013). Penelitian kualitatif. *Perspektif dalam penelitian klinis*, 4(3).
- Reimers, FM, & Chung, CK (Eds.). (2019). Pengajaran dan pembelajaran untuk abad kedua puluh satu: Tujuan pendidikan, kebijakan, dan kurikulum dari enam negara. *Pers Pendidikan Harvard*.
- Rhodes, RL (2022). Desain dan Penilaian yang Setara: Menjelajahi Perspektif Multibahasa dan Dialogisme Bakhtin dalam Pedagogi Penulisan Bahasa Inggris. Dalam *Handbook of Research on Policies and Practices for Assessing Inclusive Teaching and Learning* (hlm. 137-156). IGI Global.
- Riyanto, A. (2019). Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan nonformal Kejar Paket C di PKBM Al-Huda Wonowoso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak 2018/2019 (Skripsi). UIN Walisongo.
- Sari, I. (2020). Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kecemasan masyarakat: Literature review. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12(1), 69-76.
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2020). Implementasi

- Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Ilmu Sosial KNE, 433-440.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suroso, A., Hendriarto, P., Mr, GNK, Pattiasina, PJ, & Aslan, A. (2021). Tantangan dan Peluang Menuju Generasi Berbudaya Islami: Analisis Sosial Budaya. *Tinjauan Linguistik dan Budaya*, 5(1), 180-194.
- Thies, CG, & Sari, AC (2018). Pendekatan teori peran untuk kekuatan menengah: Memahami tempat Indonesia dalam sistem internasional. *Asia Tenggara Kontemporer*, 40(3), 397-421.
- Titaley, CR, Hunter, CL, Dibley, MJ, & Heywood, P. (2010). Mengapa beberapa wanita masih lebih memilih dukun bayi dan persalinan di rumah?: studi kualitatif tentang layanan perawatan persalinan di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. *Kehamilan dan persalinan BMC*, 10(1), 1-14.
- Tripp, D. (2011). *Insiden kritis dalam pengajaran (edisi klasik): Mengembangkan penilaian profesional*. Routledge.
- Tukker, A., Cohen, MJ, Hubacek, K., & Mont, O. (2010). Dampak konsumsi rumah tangga dan pilihan perubahan. *Jurnal Ekologi Industri*, 14(1), 13-30.
- Widana, IK, Dewi, GAOC, Suryasa, W. (2020). Pendekatan ergonomi untuk meningkatkan konsentrasi mahasiswa dalam proses pembelajaran etika profesi. *Jurnal Penelitian Lanjutan dalam Sistem Dinamis dan Kontrol*, 12(7), 429-445.
- Zulhairil, A., Akib, H., & Suradi, S. (2021). Akseptabilitas kebijakan publik: Kajian kebijakan alih kelola guru SMA dan tenaga kependidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Tinjauan Linguistik dan Budaya*, 5(S2), 1072-1082